

Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
PROVINSI DKI JAKARTA



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI DKI JAKARTA



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016 PROVINSI DKI JAKARTA**

No. ISBN: 978-602-0922-27-0

No. Publikasi: 31550.1809

No. Katalog: 9102067.31

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm Jumlah

Halaman: viii + 32 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kata Pengantar



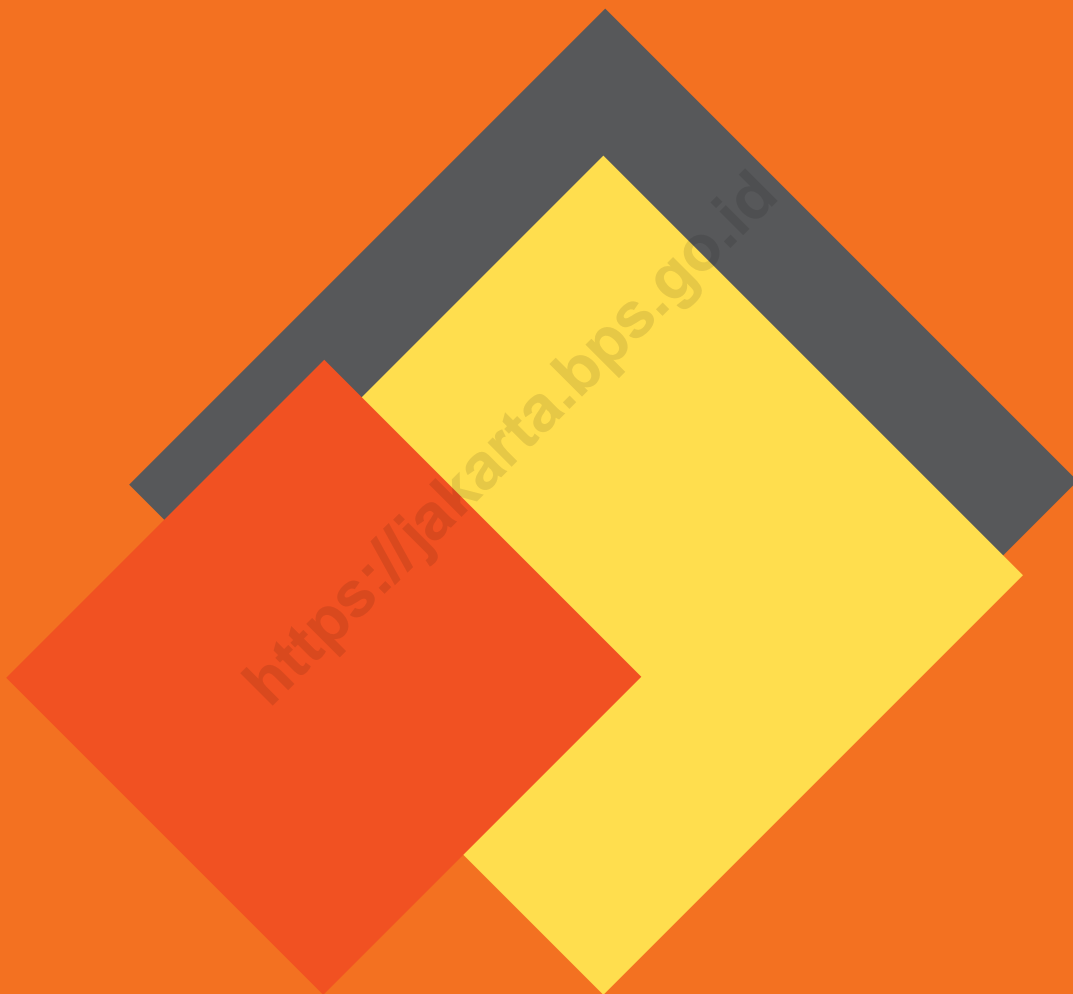
Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Thoman Pardosi





Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI DKI JAKARTA.....	3
UMK SEBAGAI ALTERNATIF PENYERAPAN TENAGA KERJA.....	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPASIBILITAS ..	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	25
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG.....	27



<https://jakarta.bps.go.id>

Pendahuluan

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 1 juta usaha atau 98,78 persen dari total usaha UMB dan UMK di DKI Jakarta. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja DKI Jakarta lebih dari 2,5 juta orang atau sekitar 35,07 persen dari total tenaga kerja. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
DKI JAKARTA

Bagian

1

<https://jakarta.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian DKI Jakarta. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di DKI Jakarta mencapai 98,78 persen dari total jumlah usaha di DKI Jakarta. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori non Pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 421 ribu usaha atau mencapai hampir 37 persen. Disusul dengan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) sekitar 339 ribu atau sekitar 29 persen serta usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, yaitu sejumlah hampir 94 ribu usaha atau lebih dari 8 persen.

Kota Jakarta Barat masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah UMK di Jakarta Barat ini sekitar 305 usaha atau mencapai lebih dari 26 persen. Kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan merupakan dua kota di DKI Jakarta dengan jumlah UMK tertinggi.

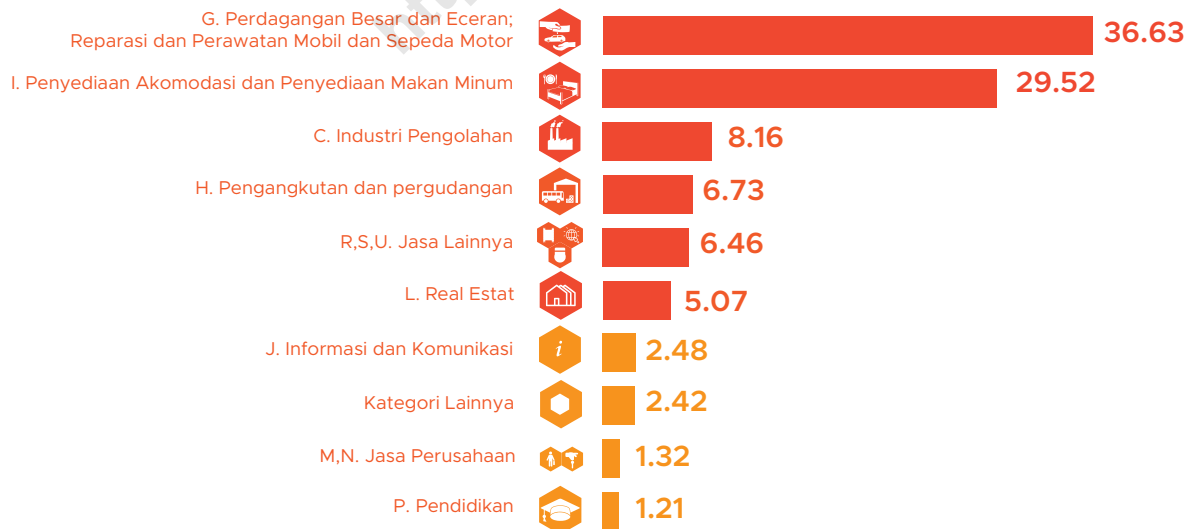
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
DKI JAKARTA**

Gambar 1.1.
Persentase Usaha Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-L

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-L

Tabel 1.1.
Jumlah dan Persentase UMK Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kepulauan Seribu	3.735	0,32
Jakarta Selatan	224.245	19,48
Jakarta Timur	252.953	21,98
Jakarta Pusat	147.745	12,84
Jakarta Barat	305.076	26,50
Jakarta Utara	217.326	18,88
Total	1.151.080	100,00

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-L



**UMK
SEBAGAI
ALTERNATIF
PENYERAPAN
TENAGA KERJA**

Bagian

2



Jumlah UMK sangat besar di Indonesia tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di DKI Jakarta terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai lebih dari 30 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di DKI Jakarta salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai hampir 27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

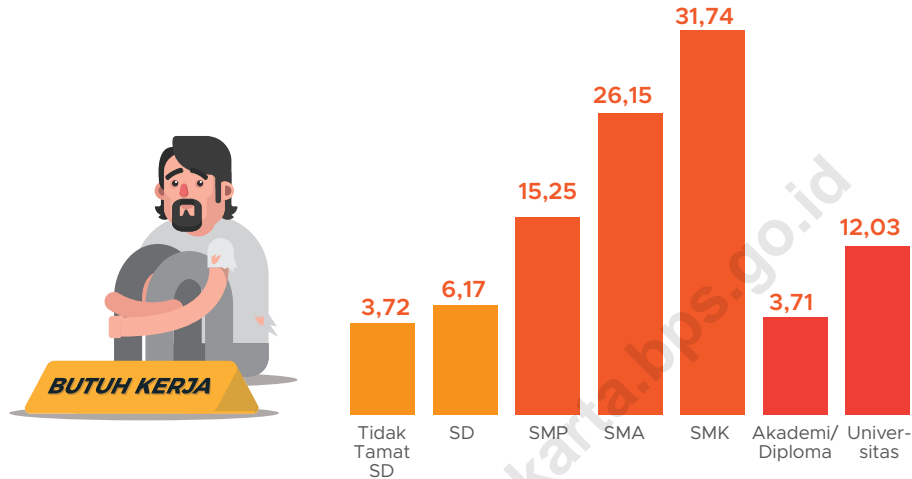
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 2,5 juta, atau sekitar tiga perempat tenaga kerja di DKI Jakarta. Dengan jumlah usaha yang mendominasi, tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sekitar 16 juta jiwa atau mencapai sepertiga dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK.

Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 9 pekerja. Sementara UMK kategori lainnya rata-rata mampu menyerap sekitar 4 pekerja. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia hanya sebesar 2 pekerja.

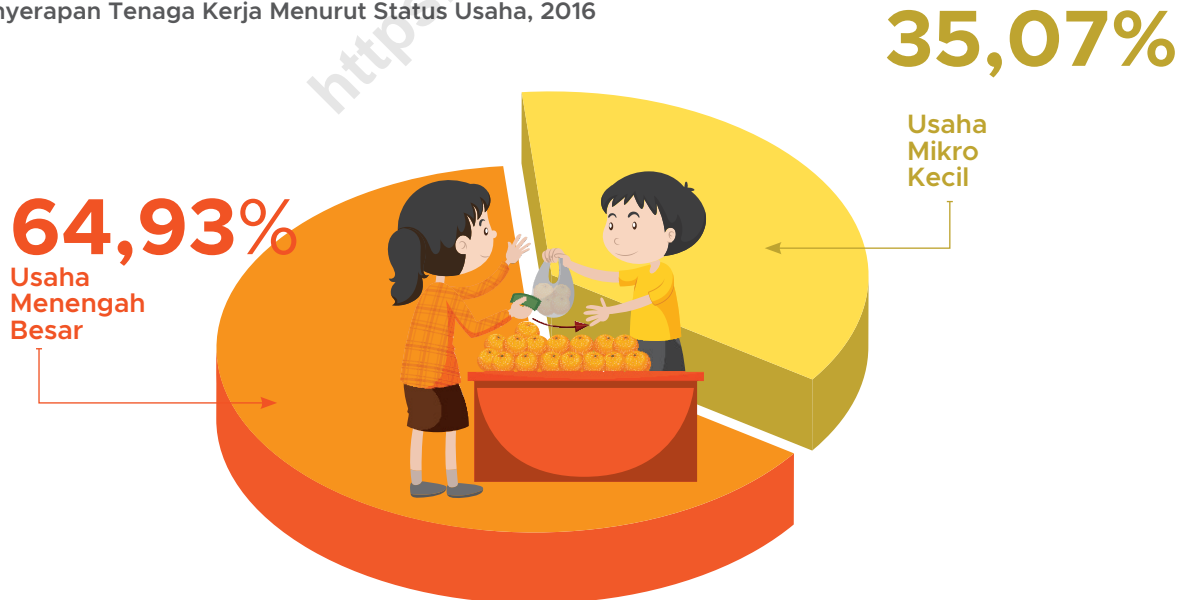
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran DKI Jakarta menurut Pendidikan, 2017



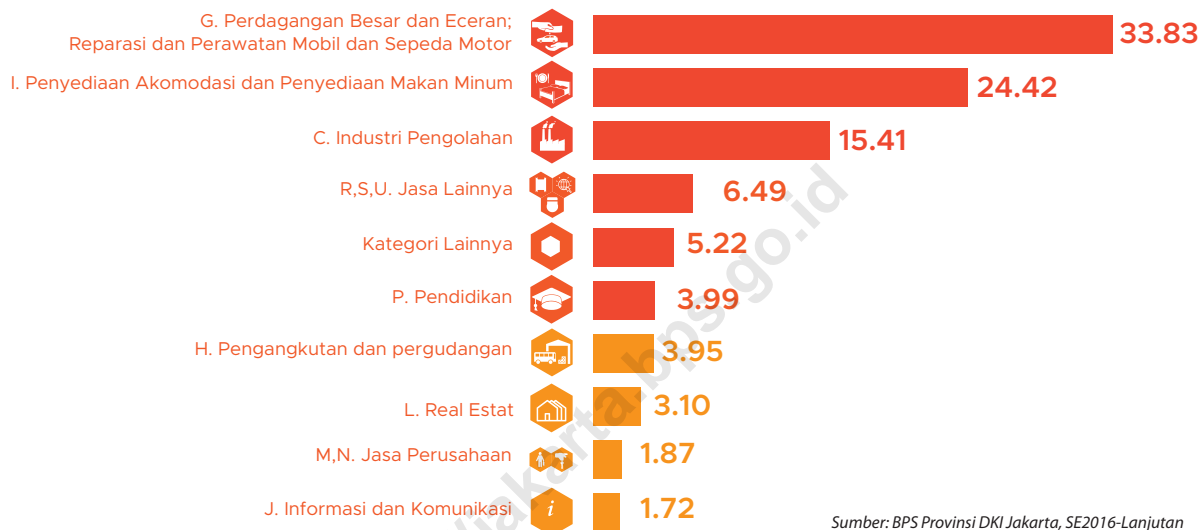
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.2.
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2016



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-L

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Tabel 2.1.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
C. Industri Pengolahan	93.984	397.766	4
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	421.625	873.267	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	77.483	101.894	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	339.758	630.230	2
J. Informasi dan Komunikasi	28.514	44.422	2
L. Real Estat	58.365	80.125	1
M,N. Jasa Perusahaan	15.249	48.168	3
P. Pendidikan	13.955	102.698	7
R,S,U. Jasa Lainnya	74.326	167.437	2
Kategori Lainnya	27.821	135.018	5

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://jakarta.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja UMK di DKI Jakarta memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

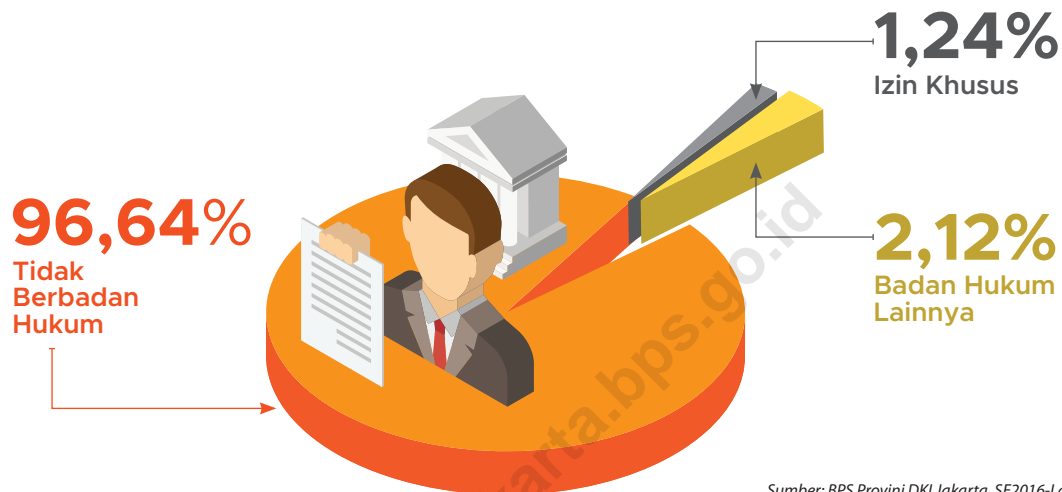
Data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana. Hal tersebut tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di DKI Jakarta, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 96 persen. Demikian pula dengan penggunaan internet sangat jarang dilakukan oleh pelaku UMK. Hanya sekitar 15 persen UMK yang menggunakan internet. Sementara itu mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer. Komputer tidak hanya bermanfaat

untuk menyusun laporan keuangan, tetapi juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran produk dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk UMK, Namun demikian, UMK yang menggunakan komputer hanya sekitar 8 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 5 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor Nonpertanian di DKI Jakarta, UMK Pada Kategori Pendidikan yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel yang status badan hukum, adanya laporan keuangan dan penggunaan komputer. UMK Pendidikan tercatat **mempunyai persentase tertinggi diantara kategori lain UMK Pendidikan tercatat mempunyai persentase tertinggi di antara kategori lainnya. Demikian pula dengan kemitraan, kategori ini paling banyak persentasenya yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lainnya.**

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.1.
Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Menggunakan Internet	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
C. Industri Pengolahan	5,02	20,95	12,23	12,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,30	14,62	8,17	5,46
H. Pengangkutan dan pergudangan	4,32	40,07	11,04	10,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,13	5,38	1,56	1,54
J. Informasi dan Komunikasi	1,61	52,25	34,67	6,17
L. Real Estat	1,06	4,59	1,78	0,44
M,N. Jasa Perusahaan	15,61	49,09	46,57	12,47
P. Pendidikan	47,97	51,05	51,83	10,84
R,S,U. Jasa Lainnya	3,05	17,67	10,54	5,17
Kategori Lainnya	16,53	25,23	18,83	10,06





**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 15 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G).

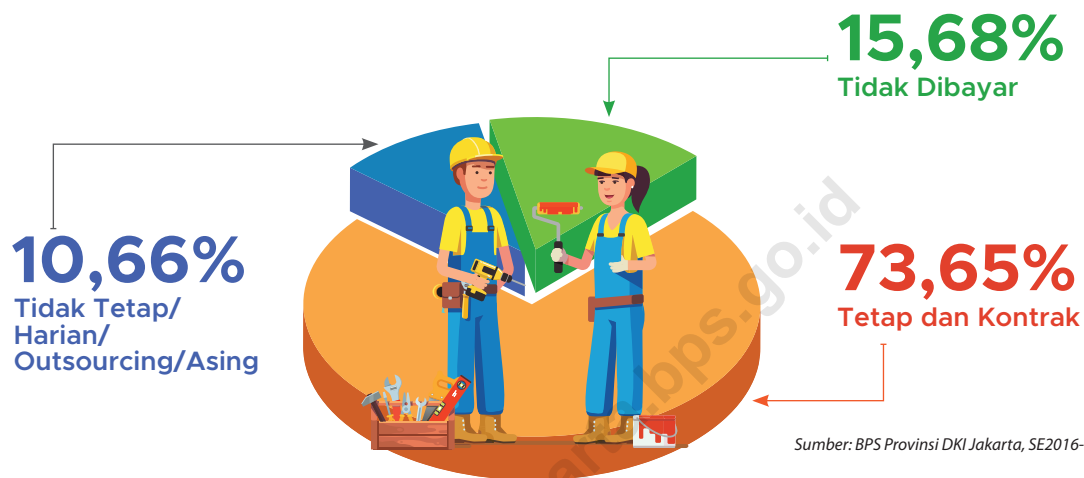
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase tenaga kerja UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 36,52 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotip bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut

dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

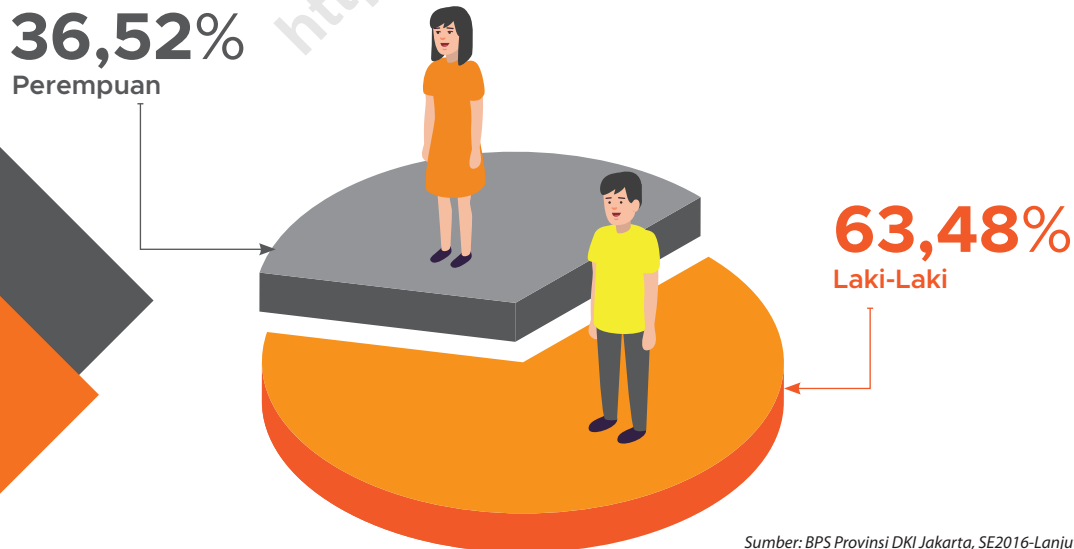
Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Sekitar 65 persen pengelola berpendidikan SMP dan SMA, Pengelola dengan pendidikan SD mencapai 16 Persen, untuk pengelola SD kebawah mencapai 5 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan.

**PELAKU
UMK PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

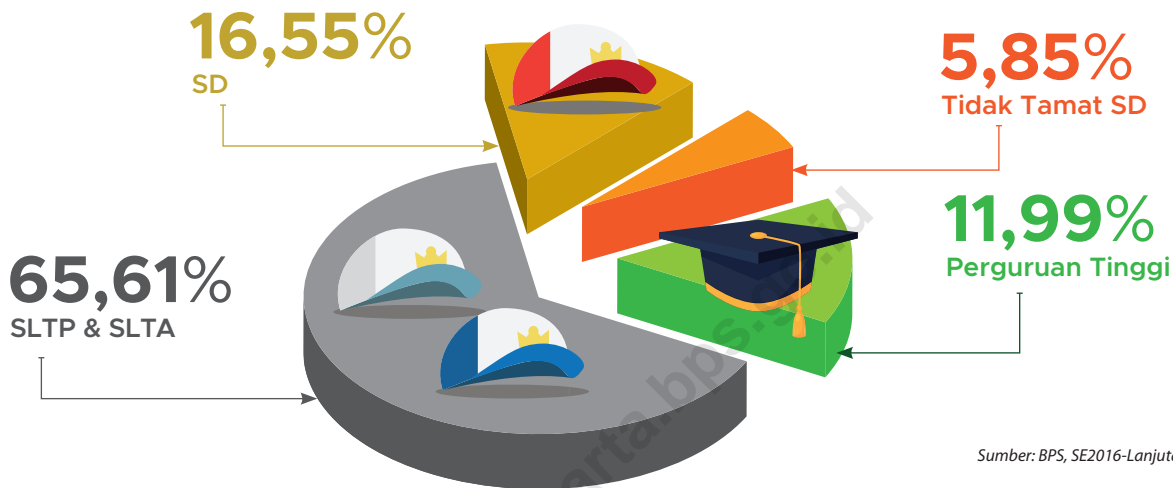
Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerja, 2016



Gambar 4.2.
Persentase Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Gambar 4.3.
Persentase Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Jumlah Tenaga Kerja

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
C. Industri Pengolahan	10,47	3,71	1,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	25,38	2,19	6,27
H. Pengangkutan dan pergudangan	3,40	0,14	0,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17,88	1,09	5,45
J. Informasi dan Komunikasi	1,33	0,05	0,35
L. Real Estat	2,40	0,05	0,65
M,N. Jasa Perusahaan	1,43	0,27	0,17
P. Pendidikan	3,62	0,23	0,13
R,S,U. Jasa Lainnya	5,04	0,78	0,67
Kategori Lainnya	2,72	2,16	0,35

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://jakarta.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

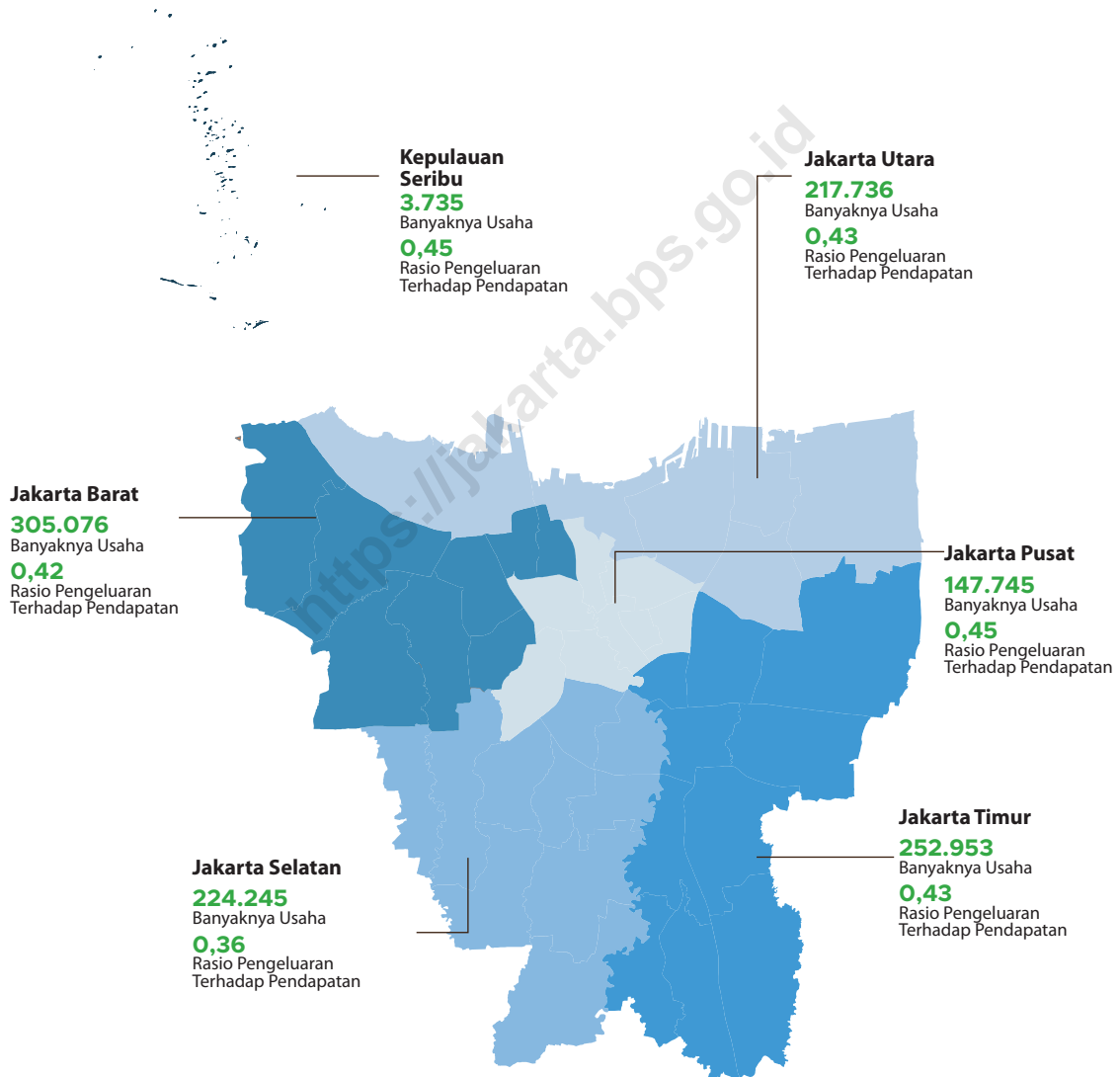
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Sekitar sepertiga UMK di Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK secara Provinsi DKI Jakarta mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 227,8 triliun.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada Infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kota Jakarta Selatan adalah yang paling *profitable* di Provinsi DKI Jakarta dengan rasio 0,36. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat.

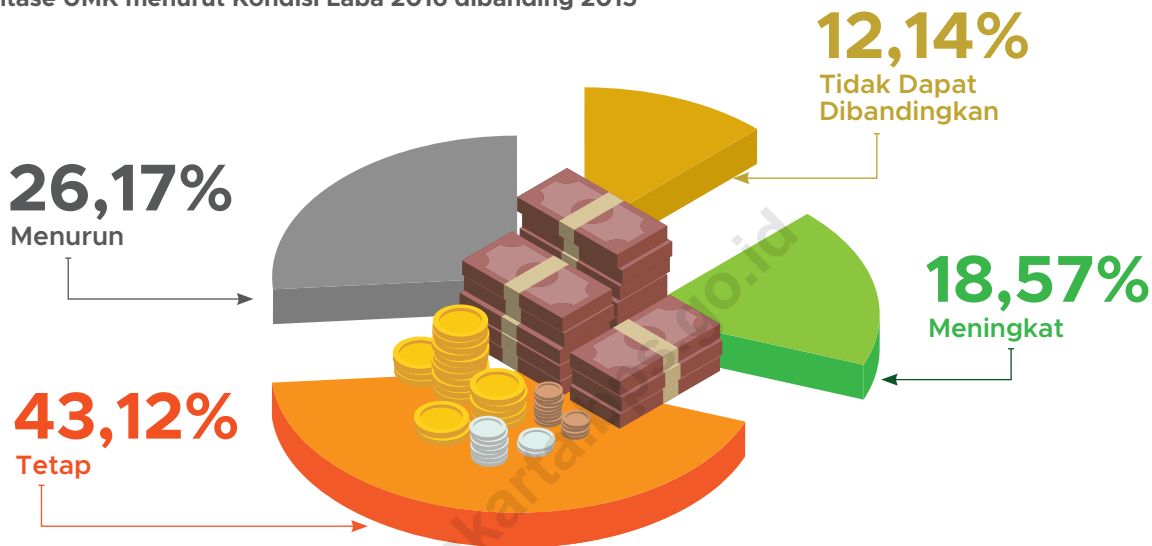
Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, Kategori P (Pendidikan) dan Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,22 dan 0,24. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan.

Namun demikian, Aktivitas Pendidikan (Kategori P) bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja tertinggi. Rata-rata balas jasa pekerja paling tinggi justru dihasilkan dari Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G), yaitu sebesar 9 juta per pekerja. Selanjutnya diikuti oleh Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (Kategori I) yang masing-masing memberikan balas jasa sekitar 8 juta dan hampir 4 juta per pekerja

Gambar 6.1.
Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap
Pendapatan UMK Menurut Wilayah

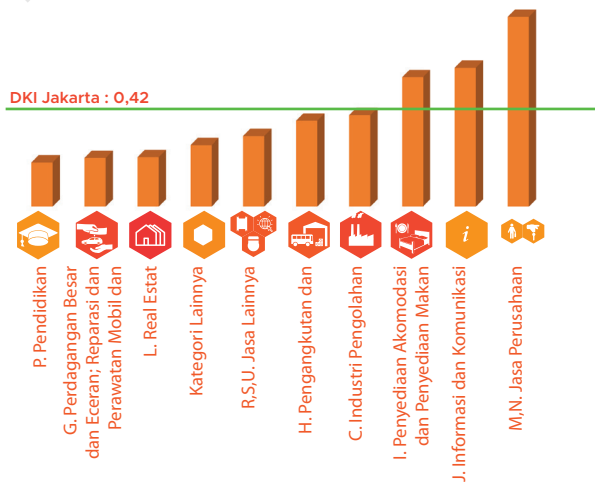


Gambar 6.2.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

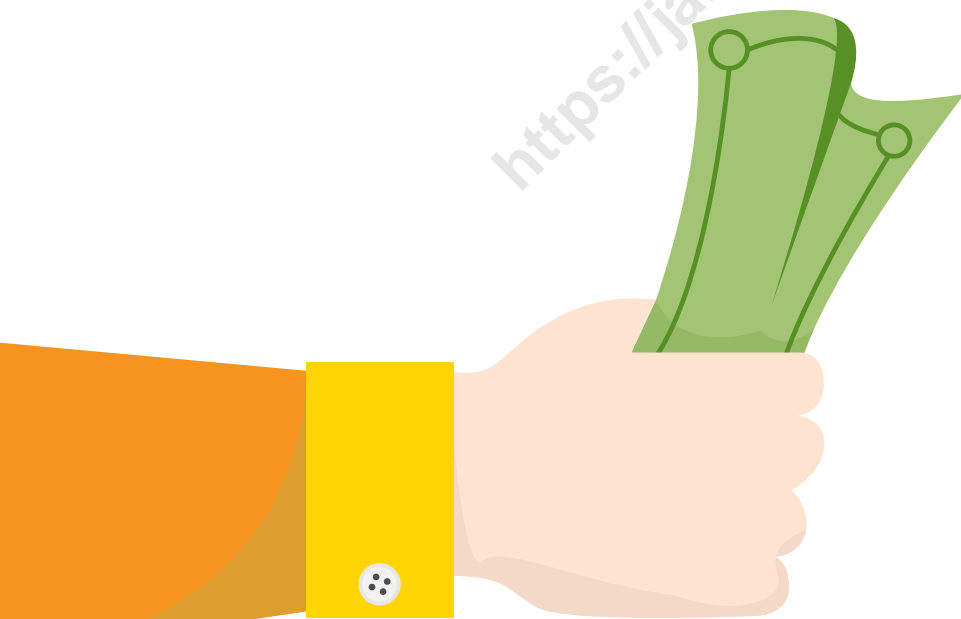
Gambar 6.3.
Rasio Pendapatan terhadap pengeluaran menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 5.
Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Ribu Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
C. Industri Pengolahan	8.282
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	9.044
H,J. Pengangkutan dan Pergudangan & Informasi dan Komunikasi	489
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.899
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	162
L. Real Estat	136
M,N. Jasa Perusahaan	970
P. Pendidikan	3.420
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	2.022
Lainnya	3.622
Total	32.050





<https://jakarta.bps.go.id>

**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

6

<https://jakarta.bps.go.id>

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pada UMK, pengusaha atau pengelola yang menyatakan bahwa usaha mereka mempunyai prospek yang lebih baik di masa mendatang mencapai 42,25 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Kendala utama UMK di Provinsi DKI Jakarta adalah adanya pesaing dan masalah permodalan/likuiditas. Kedua kendala tersebut dihadapi oleh pengusaha masing-masing sebanyak 37 dan 27 persen.

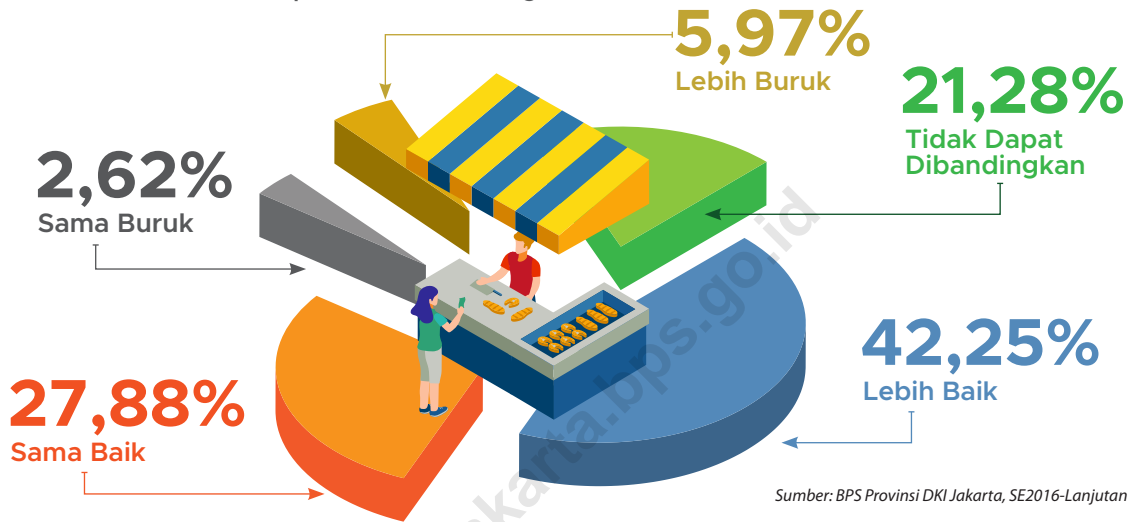
Saat ini teknologi informasi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi sudah masuk ke semua bidang, termasuk dalam dunia usaha. Manfaat bagi dunia usaha adalah untuk mendukung proses menjalankan usaha untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif. Penggunaan internet bagi dunia usaha yang

paling terlihat adalah dalam proses pemasaran produk. Dengan akses penguasaan teknologi yang mumpuni dan mengikuti perkembangan jaman, prospek UMK akan menjadi lebih baik.

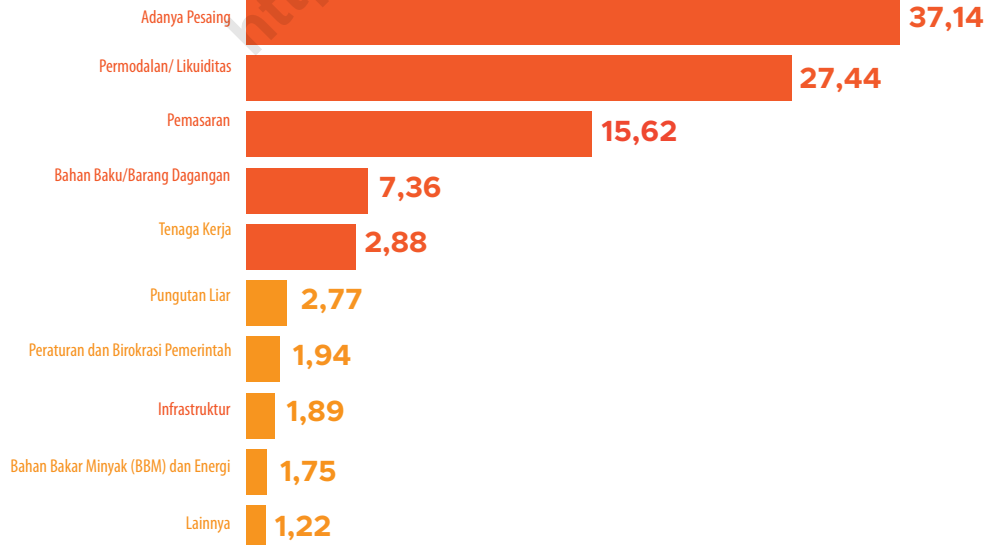
Pengusaha UMK yang menggunakan internet dalam menjalankan usahanya dan menyatakan prospeknya lebih baik, cenderung memiliki persentasenya yang lebih tinggi dari mereka yang tidak menggunakan internet. Demikian halnya dengan pengusaha UMK yang menggunakan komputer dalam menjalankan bisnisnya cenderung memiliki prospek yang positif di masa depan. Usaha yang menggunakan internet dan memanfaatkan komputer memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan.

**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 7.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang



Gambar 5.2.
Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2017





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah 36-38, Paseban Senen Jakarta Pusat 10440
Telp : (021) 31928493, 31928496, Fax : (021) 3152004
Homepage : <http://jakarta.bps.go.id> E-mail : bps3100@bps.go.id

ISBN 978-602-0922-27-0

